

NEGARA LATOA: TINJAUAN BERNEGARA MASYARAKAT BUGIS DALAM LONTARA LATOA

Awal Muqsith¹, Muhammad Saleh Tajuddin², Andi Aderus³

UIN Alauddin Makassar^{1,2,3}

Email: mooqzku@gmail.com¹, saleh.tajuddin@uin-alauddin.ac.id²,
andiaderus@tahoo.com³

Abstrak

Kajian ini akan mengeksplorasi wawasan bernegara dalam Lontara Latoa, yang dijadikan sebagai referensi dan acuan politik di kerajaan Bone sejak Raja Bone Ketujuh La Tenrirawe Bongkangnge lalu menjadi kitab politik di tanah Bugis. Konsep negara yang dijadikan acuan teoretis adalah institusi kekuasaan yang memiliki aparatur pemerintahan, rakyat, dan zona atau wilayah kekuasaan. Ketiga elemen ini akan dijadikan sebagai instrumen teoretis untuk memilah teks-teks Latoa yang berbicara mengenai ketiga hal tersebut. Metode penelitian ini adalah kualitatif dengan jenis kepustakaan karena objek penelitian yang dikaji adalah teks Lontara Latoa. Sumber data penelitian ini adalah Lontara Latoa yang dikumpulkan oleh B.F. Matthes yang masih menggunakan aksara Lontara. Hasil kajian ini memberikan sebuah konstruk negara dalam paradigma masyarakat Bugis yang tertuang dalam Lontara Latoa.

Kata Kunci:

Latoa, Negara, Bugis

Abstract

This study explored the concept of state in Lontara Latoa, which was used as a political reference in the kingdom of Bone since the Seventh Bone King La Tenrirawe Bongkangnge then became a political book in the land of Bugis. The concept of the state which was used as a theoretical reference was an institution of power that has a government apparatus, people, and zones or areas of power. These three elements would serve as theoretical instruments for sorting Latoa texts that talk about these three things. This research method was qualitative with the type of literature because the object of study studied was Latoa Lontara text. The data source of this research was Lontara Latoa collected by B.F. Matthes which was still written in Lontara script. The results of this study provided a state construct in the paradigm of the Bugis community as outlined in Lontara Latoa.

Keywords:

Latoa, State, Buginese

Pendahuluan: Seputar tentang Naskah Lontara Latoa

Lontara Latoa adalah manuskrip dalam peradaban literasi Bugis yang berisi tentang kumpulan ucapan dan petuah raja dan orang bijak Bugis (*kajao*) mengenai berbagai masalah sosial dan kemasyarakatan, terutama berkenaan dengan kewajiban raja terhadap rakyat dan sebaliknya.¹ Latoa diperkirakan ditulis pada zaman Raja Bone Ke-VII La Tenrirawe Bongkanngge. *Arung* Bongkanngge memerintah kerajaan Bone sekitar tahun 1560-1578. Latoa memiliki peran penting dalam kepustakaan politik Bugis. Menurut Mattulada, kitab Latoa dijadikan tuntunan bagi penguasa terutama dalam menjalankan pemerintahan dan melaksanakan peradilan dalam pemerintahan masyarakat Bugis.² Sedangkan menurut Andi Zainal Abidin, Latoa merupakan material penting dalam membaca pola pemerintahan dan politik masyarakat Bugis yang lebih rasional ketimbang pola pemerintahan mistik dan meta-manusiawi dalam sistem politik *Tomanurung* dan La Galigo.³ Naskah Latoa yang ada sekarang merupakan tulisan tangan *Arung* Pancana, Colli' Pujie Matinroe ri Puce, lalu dihadiahkan kepada B.F. Matthes. Matthes mengumpulkan manuskrip Bugis kemudian dijadikan satu bundel yang dikenal dengan "*Boeginesche Chrestomathie*".⁴ Naskah Latoa yang asli tulisan tangan *Arung* Colli' Pujie kini disimpan di perpustakaan Universitas Leiden dalam katalogus (*Kortverslag* Dr. B.F. Matthes tahun 1875) bernomor daftar HS. 120.⁵ Kajian ini akan mengacu kepada naskah *Boeginesche Chrestomathie* yang telah dikumpulkan Matthes tersebut.

Besar kemungkinan naskah Latoa yang ada dalam *Boeginesche Chrestomathie* adalah ingatan oral yang dituliskan oleh Colli' Pujie. Hal tersebut didasarkan pada naskah La Galigo dua belas jilid yang ditulis oleh Colli' Pujie juga, diakui Matthes sebagai ingatan oral dari Colli' Pujie.⁶ Kemampuan Colli' Pujie dalam mengingat budaya dan produk intelektual Bugis, kemungkinan besar dari statusnya sebagai putri

¹ Mattulada, *Latoa: Satu Lukisan Analitis terhadap Antropologi Politik Orang Bugis* (Ujung Pandang: Hasanuddin University Press, 1995), h. 79.

² *Ibid.*

³ Andi Zainal Abidin, "The Emergence of Early Kingdom in South Sulawesi" dalam *Southeast Asian*, Vol. 20, No. 4 (1983), h. 458.

⁴ Rahilah Omar, "The History of Bone A.D. 1775-1795: The Diary of Sultan Ahmad as-Salleh Syamsuddin". *Thesis*. (UK: University of Hull, 2013), h. 18.

⁵ Mattulada, 1995, *Op.Cit.*, h. 79-80.

⁶ Sirtjo Kolhoof, "The La Galigo: a Bugis Encyclopedia and its Growth" dalam *BKI* 155, No. 3 (1999), h. 370.

mahkota kerajaan Tanete, meskipun pada saatnya nanti yang menjadi *Arung* Tanete adalah We Tenriollang anak Colli' Pujie sendiri.⁷ Sebagai seorang putri mahkota kerajaan, Colli' Pujie telah mendapatkan akses untuk informasi oral yang dimiliki oleh elit kerajaan, salah satunya adalah Latoa.

Dalam kajian Cumming, informasi oral dan tulis merupakan kapital politik yang harus dimiliki para penguasa di tanah Bugis.⁸ Selain itu, di masa pemerintahan La Rumpang, ayah Colli' Pujie, yang juga Raja Tanete, karena kecewa dengan Belanda, menyerahkan masalah administrasi keuangan kerajaan kepada Colli' Pujie.⁹ Dengan demikian dapat dipastikan bahwa naskah Latoa yang ada sekarang dan fungsinya sebagai kitab politik dapat diafirmasi dengan mempertimbangkan bahwa naskah tersebut disalin oleh seorang elit penguasa Bugis Arung Pancana Toa Colli' Pujie.

Untuk mendiskusikan negara Latoa lebih jauh, maka dirumuskan pertanyaan umum yang dapat membantu dalam mengkerangkai tulisan ini, yakni bagaimana hakikat negara masyarakat Bugis sebagaimana yang tertuang dalam Lontara Latoa?.

Kajian Tentang Latoa

Naskah Latoa saat ini telah ditransliterasi dan diterjemahkan oleh Mattulada dalam karya disertasi yang dibukukan. Mattulada dalam *Latoa: Satu Lukisan Analitis terhadap Antropologi Politik Orang Bugis*. Karya Mattulada merupakan kajian pertama yang secara komprehensif memaparkan dan menerjemahkan teks Latoa. Dalam karya tersebut, Mattulada membagi menjadi empat bab. Bab pertama berisi pendahuluan yang dapat dikatakan gambaran dan deskripsi tentang antropologi, budaya dan kesusteraan masyarakat Bugis. Bab kedua berisi tentang uraian dan sumber naskah Latoa yang digunakan Mattulada. Bab kedua juga berisi tentang isi secara lengkap naskah Latoa. Bab ketiga berbicara tentang topografi kerajaan masyarakat Bugis secara umum dan masyarakat Bone secara umum. Bab keempat berbicara tentang antropologi politik masyarakat Bugis masa kini. Urgensi dan peran penting yang dimiliki karya Mattulada, karena karya tersebut memaparkan secara lengkap teks dan naskah Latoa yang disertai

⁷ Nurhayati Rahman, *Retna Kencana Colliq Pujie Arung Pancana Toa 1812-1876: Intelektual Penggerak Zaman* (Makassar: La Galigo Press, 2008), h. 113-125.

⁸ William Cumming, "Rethinking the Imbrication of Orality and Literacy: Historical Discourse in Early Modern Makassar" dalam *The Journal of Asian Studies*, Vol. 62, No. 2 (2003), h. 535.

⁹ Nurhayati Rahman, *Loc.Cit.*

dengan terjemahan peralinea yang menjadikan karya tersebut patut untuk menjadi referensi induk tentang naskah Latoa. Dalam perspektif konstruksi teori politik, karya Mattulada memerlukan sistematisasi dan eksplorasi teoritik untuk menjelaskan dan mengurai perspektif politik masyarakat Bugis dengan menjadikan Latoa sebagai basis teoretis.

Andi Rasdiyanah dalam *Sistem Pangngaderreng dalam Latoa dengan Sistem Syariat Islam (Wacana Integrasi Sistemik)*. Karya tersebut menegaskan terjadinya integrasi antara syariat Islam dengan sistem *pangngaderreng* dalam realitas masyarakat sebagaimana yang termaktub dalam naskah Latoa. Integrasi tersebut terjadi dalam bentuk substansial dan struktural. Pada bentuk integrasi substansial, materi dan substansi syariat Islam terintegrasi dengan aspek *pangngaderreng* yang terjadi dalam dua bentuk integrasi yang bersifat asimilasi dan integrasi yang bersifat adaptasi. Integrasi asimilasi adalah pembaruan yang terjadi sedemikian rupa sehingga sulit lagi untuk dipisahkan satu sama lain. Misalnya dalam kepercayaan ketuhanan antara *Dewata Seuae* konsep Allah. Integrasi bersifat adaptasi yakni terdapat kesamaan di samping perbedaan antara syariat Islam dan *pangngaderreng*, khususnya beberapa hal dalam putusan hukum serta masalah hukum perkawinan. Misalnya larangan yang termaktub dalam Latoa yang melarang menikah dengan golongan yang tidak sederajat. Larangan tersebut tidak terdapat dalam syariat Islam namun dapat diadaptasikan. Integrasi struktural adalah integrasi yang terjadi karena syariat Islam telah disebutka secara inklusif dalam struktur *pangngaderreng* yang disebut sebagai *sara'*. Wujud konkritnya adalah terdapat aparat *sara'* sebagai salah satu komponen dari salah satu aparat kerajaan yang disebut sebagai *pakkatenni ade'* (pemangku adat) serta pejabat tinggi yang disebut *kali (qadhi)*.¹⁰ Catatan penting untuk penelitian ini adalah cakupan dan skop *pangngaderreng* sebagai sistem regulasi masyarakat Bugis bersifat universal dan mencakup setiap lapisan struktur sosial. Akan tetapi berdasar dari hipotesa awal peneliti, ternyata sistem *pangngaderreng* terbatas pada sistem ketatanegaraan, sedangkan sistem regulasi yang berkaitan dengan sistem struktur sosial lain diatur dalam sistem regulasi *ade'* (الله). Penelitian ini berusaha menunjukkan bahwa sistem

¹⁰ Andi Rasdiyanah, *Sistem Pangngaderreng dalam Latoa dengan Sistem Syariat Islam (Wacana Integrasi Sistemik)* (Makassar: Alauddin University Press, 2013).

ketatanegaraan Bugis diatur dalam sistem tersendiri yang disebut dengan *pangngaderreng*.

Dari kedua karya di atas dapat dijelaskan bahwa Mattulada tidak menekankan fungsi Latoa dalam konstruksi sistem politik dalam skala makro. Begitupun peran Latoa dalam mengkonstruksi paradigma institutif tidak disentuh secara mendalam. Sementara itu, Andi Rasdiyana dengan menggunakan perspektif hukum Islam. Terlihat jelas kajian tersebut telah keluar dari konteks Latoa sebagai referensi politik dan bukan sebagai referensi hukum. Meskipun harus diakui terjadi integrasi sistemik antara hukum Islam dan sistem *pangngaderreng* Bugis, namun integrasi tersebut terjadi setelah institusi negara dan paradigma politik terintegrasi. Hal ini yang tidak disadari oleh Andi Rasdiyana.¹¹ Oleh karena itu kajian ini akan meletakkan Latoa sebagai politik lalu membiarkannya berbicara tentang salah satu tema sentral politik yaitu konsep negara, yang tidak disentuh oleh para peneliti sebelumnya.

Pemahaman tentang Negara

Negara secara etimologis memiliki dua makna, yakni; *Pertama*, organisasi dalam suatu wilayah yg mempunyai kekuasaan tertinggi yg sah dan ditaati oleh rakyat dan; *Kedua*, kelompok sosial yg menduduki wilayah atau daerah tertentu yg diorganisasi di bawah lembaga politik dan pemerintah yg efektif, mempunyai kesatuan politik, berdaulat sehingga berhak menentukan tujuan nasionalnya.¹² Kata negara yang digunakan dalam bahasa Indonesia terserap dari bahasa Sanskerta yang digunakan dalam tradisi tulis oleh Mpu Prapanca dalam karyanya *Nagarakertagama*. Kata nagara dengan pecahannya *negara*, *nagari* dan *negeri* dalam Sanskerta dapat bermakna; kota, kampung dan negara.¹³

Para pengkaji politik sepakat untuk menyamakan konsep terminologi negara dengan segala partikularitas maknanya dengan terminologi *state*. Berdasar dari persamaan tersebut, maka dalam pembahasan terminologis ini, kedua term *state* dan negara diberikan definisi operasional yang sama. Miriam Budiardjo, misalnya, dalam

¹¹ *Ibid.*

¹² Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), h. 999.

¹³ Clifford Geertz, *Negara: The Theatre of State in Nineteenth-Century Bali* (New Jersey: Princeton University Press, 1980), h. 4.

mendefinisikan negara sebagai terminologi politik menyamakan dengan istilah *state*. Miriam merangkum pendapat dari Roger H. Soltau, Harold J. Laski, Max Weber dan Robert M. Maciver. Dari rangkuman tersebut, Miriam berpendapat bahwa negara adalah “Suatu daerah teritorial yang rakyatnya diperintah (*governed*) oleh sejumlah pejabat dan yang berhasil menuntut dari warga negaranya ketaatan pada peraturan perundang-undangannya melalui penguasaan (kontrol) monopolistik terhadap kekuasaan yang sah.”¹⁴

Negara dalam definisi Miriam di atas menggunakan perspektif organisasional, yakni institusi yang memiliki aparatur, rakyat dan daerah kekuasaan. Pendekatan organisasional juga diadopsi oleh Bob Jessop namun dengan istilah yang berbeda. Jessop menyebutnya sebagai Pendekatan-Tiga-Element (*The Three-Element Approach*). Pendekatan ini mengadopsi gagasan Weber tentang kekuasaan dan negara. Elemen fundamental yang terdapat dalam pendekatan organisasional terdiri dari; aparat pemerintah; demarkasi teritorial yang jelas dan; penduduk atau warga yang menjadi objek kekuasaan. Jessop menjelaskan:

*The three elements that it identifies are: (1) a politically organized coercive, administrative, and symbolic apparatus endowed with both general and specific powers (variously described as Staatsgewalt, Staatsapparat, or Staatshoheit: respectively, state power, state apparatus, or state sovereignty) –reflected in Weber’s interpretation of ‘human community’ as the administrative staff of the state; (2) a clearly demarcated core territory under more or less contested and continuous control of the state apparatus (Staatsgebiet: state territory); and (3) a permanent or stable population, on which the state’s political authority and decisions are binding (Staatsvolk).*¹⁵

Tiga elemen tersebut adalah: (1) organisasi politik koersif, administrasi dan aparat simbolik yang memiliki kekuasaan umum dan khusus (elemen ini diistilahkan Weber sebagai; *Staatsgewalt*; *Staatsapparat*; atau *Staatshoheit*; yaitu kekuasaan negara, kekuasaan aparatur, dan kekuasaan berdaulat) –yang direfleksikan dalam gagasan Weber tafsir atas “perkumpulan manusia” sebagai staf administrasi negara; (2) pusat teritorial yang terdemarkasi secara jelas baik berada dalam kondisi tekanan yang lebih atau kurang terkontestasi dan pengawasan yang berkesinambungan bagi aparatur negara; dan (3) penduduk permanen dan tetap yang menjadi objek kekuasaan dan otoritas negara, yang diistilahkan oleh Weber sebagai *Staatsvolk*.

¹⁴ Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 49.

¹⁵ Bob Jessop, *The State: Past, Present, Future* (Cambridge: Polity Press, 2016), h. 26.

Pemaparan di atas mengafirmasi elemen negara yang akan dijadikan sebagai instrumen teoretis dalam penelitian ini, yang terdiri dari aparatur pemerintahan, rakyat dan populasi, serta zona dan daerah wilayah kekuasaan.

Medote Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif berbentuk studi kepustakaan (*library research*). Dalam penelitian ini sumber data dan bahan yang dibutuhkan bersumber dari bahan-bahan tertulis untuk mencapai sebuah kesimpulan penelitian dalam mengembangkan atau membangun sebuah gagasan dan pemahaman baru dari tokoh, teori atau literatur yang telah ada.¹⁶

Pendekatan pada penelitian ini berusaha menggabungkan beberapa pendekatan untuk mendapat bangunan teoretis yang komprehensif. Untuk mencapai hasil penelitian tersebut digunakan beberapa pendekatan, yaitu; *Pertama*, pendekatan sosio-historis, yaitu cara mendekati permasalahan dengan melihat kondisi obyektif masyarakat dan kilas balik dari sejarah yang menggambarkan adanya tarik menarik antara yang pro dan kontra dalam latar dan situasi kultural pada objek yang diteliti.¹⁷ *Kedua*, pendekatan filosofis adalah salah satu metode berfikir yang bertumpu pada aspek substansi (ontologi), prosedur (epistemologi) dan nilai serta fungsi (aksiologi).¹⁸ *Ketiga*, pendekatan semantik merupakan pendekatan yang digunakan untuk mempelajari objek penelitian studi teks dengan teori kebahasaan.¹⁹

Sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua bentuk, yakni sumber primer dan sumber sekunder. Teks Lontara Latoa yang dijadikan referensi dalam penelitian adalah naskah dihadirkan Arung Colli Pojie kepada Dr. B.F. Matthes. Kumpulan naskah tersebut diterbitkan Matthes dengan judul "*Boeginesche Chrestomathie*" yang terdiri dari dua jilid, yang diterbitkan oleh Het Nederlandsh Goovernmen Gedrukt te Amsterdam Bij C.A. Spin & Zoon tahun 1872. Dalam membantu pemahaman terhadap teks tersebut digunakan pula terjemahan Prof. Mattulada atas Lontara Latoa dengan judul "*Latoa: Satu Lukisan Analitis terhadap*

¹⁶ Kaelan, *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat* (Yogyakarta: Paradigma, 2005) h. 32.

¹⁷ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), h. 73.

¹⁸ Anton Bakker & Achmad Charris Zubair, *Metodologi Penelitian Filsafat* (Yogyakarta: Pustaka Filsafat, 1990), h. 63.

¹⁹ Noeng Muhajir, *Metode Penelitian Kuantitatif* (Yogyakarta, 1996), h. 159.

Antropologi Politik Orang Bugis". Selain sumber primer tersebut, digunakan pula referensi yang berbicara tentang konteks politik masyarakat Bugis yang berhubungan secara langsung atau tidak langsung, baik berupa jurnal asing atau local, dokumen dan sumber oral, serta kajian dan penelitian yang menyentuh tema penelitian ini baik secara langsung maupun tidak langsung.

Aparatur Pemerintahan dalam Lontara Latoa

Posisi Raja dalam Lontara Latoa

Pucuk pimpinan tertinggi dalam Lontara Latoa dipegang dan dipimpin oleh seorang *Arung*. Dalam menjalankan tugasnya *Arung* dibantu oleh pejabat negara dengan tugas khusus tertentu. *Arung* beserta pembantunya berfungsi sebagai *Staatsgewalt*, *Staatsapparat* atau *Staatshoheit*, yaitu kekuasaan negara, kekuasaan aparatur, dan kekuasaan berdaulat. Konsep kepemimpinan masyarakat Bugis berbentuk monarki oligarkis. Kekuasaan dipegang oleh kelas tertinggi dengan hak-hak istimewa yang dilanjutkan melalui garis genetik keturunan mereka. Garis keturunan yang paling berhak untuk dinominasikan sebagai *Arung* adalah kelas yang memiliki silsilah langsung dengan pemimpin pertama Bugis pasca La Galigo, yaitu *Tomanurung*. Garis genetik ini dianggap paling layak dan paling berhak untuk mendapatkan legitimasi kekuasaan.

Genetika kepemimpinan merupakan salah satu syarat mutlak untuk menduduki kepemimpinan di tanah Bugis. Salah satu kasus menarik terjadi pada Raja Ke-II Bone La Ummasa, yang merupakan anak keturunan langsung *Tomanurung*, tepatnya Manurungge ri Matajang. Akan tetapi karena La Ummasa menikah dengan perempuan dari lapis sosial biasa, maka kedua anaknya To Suwalle dan To Salawakka tidak dapat dinominasikan sebagai *Mangkau* (Raja Bone). Penerus La Ummasa digantikan oleh anak dari saudaranya, We Pattanra Wanua, yang menikah dengan *Arung* Palakka La Pattingki. Hasil pernikahan mereka melahirkan La Saliyu Karampelua. Raja Karampelua diangkat menjadi raja setelah Raja La Ummasa mengumpulkan rakyat dan *matowa* (raja kecil) Bone di istananya. Raja La Ummasa mengikrarkan Raja La Saliyu Karampelua, yang saat itu baru berumur sehari, sebagai penggantinya. Karena umurnya yang baru sehari, maka Raja La Saliyu dibantu oleh dua orang sepupunya yang juga anak dari Raja La Ummasa, yaitu To Suwalle sebagai *Kajao Ciung*, yang bertugas untuk

᳚᳚᳚/temmatinropi matana Arungnge ri esso ri wēnni nawanawai adecengēnna tanana).²³ Ketiga, memiliki pandangan yang luas dan bijak (᳚᳚᳚᳚ ᳚᳚᳚᳚ ᳚᳚᳚᳚ ᳚᳚᳚᳚/natangngai olona munrinna gaue na pogau).²⁴

Keempat, kukuh menjaga pangngadêrrêng (aturan sosial kemasyarakatan). Kajao menyebutnya sebagai “᳚᳚᳚ ᳚᳚ ᳚᳚᳚/maccapi pinru’ ada”.²⁵ Kelima, memiliki pandangan dan kebijakan yang sesuai dengan rapang, yaitu ajaran masa lalu yang dijadikan sebagai sumber hukum. Syarat ini diistilahkan oleh Kajao sebagai “᳚᳚᳚ ᳚᳚᳚᳚ ᳚᳚᳚᳚/maccapi duppai ada”.²⁶ Keenam, memiliki kesadaran penuh terhadap hukum (bicara). Kajao mengistilahkan “᳚᳚᳚᳚᳚᳚ ᳚᳚᳚᳚ ᳚᳚᳚᳚ ᳚᳚᳚᳚ ᳚᳚᳚᳚/têngng-alupangngi surona poada ada tongeng”.²⁷ Ketujuh, memberikan perlindungan dan keamanan dengan penuh hati kepada rakyatnya dengan menjaga harta benda dan kehormatan mereka. Syarat ini disebut sebagai “᳚᳚᳚᳚᳚᳚/obbi’e”.²⁸ Obbi’e (seruan) yang dimaksud oleh Kajao adalah seruan kepada raja untuk tidak mengambil kerbau, kuda dan hasil ladang yang bukan milik raja. Seruan atau dapat dimaknai sebagai tuntutan untuk bertindak jujur dan berintegritas.

Pemimpin yang memenuhi syarat yang telah ditetapkan dinominasikan untuk menjadi raja. Penunjukan raja adalah merupakan hasil musyawarah dari rakyat melalui dewan adat dan semacamnya. Hal yang terpenting adalah penahbisan seorang raja didasari oleh kesepakatan dan konsensus antara rakyat dan penguasa.

Aparat Pemerintahan Lainnya

Sistem kepemimpinan Bugis bersifat kerajaan yang dipimpin oleh *Arung* yang dibantu oleh beberapa pembesar kerajaan yang mirip dengan menteri. Aparat pemerintahan ini berfungsi sebagai *Staatsapparatur* dalam menjalankan peran administrasi negara. Terdapat perbedaan kecil dalam tiap sistem kerajaan yang tersebar di Bugis. Sistem aparatus negara di Bone misalnya berbeda dengan di Wajo, Soppeng dan sebagainya. Dalam pembahasan ini akan dikaji sistem distribusi kekuasaan melalui

²³ *Ibid.*

²⁴ *Ibid.*

²⁵ *Ibid.*, h. 2.

²⁶ *Ibid.*

²⁷ *Ibid.*

²⁸ *Ibid.*, h. 3.

aparatus negara yang ada di Bone. Pertimbangan tersebut didasarkan pada aplikasi dari ajaran Latoa lebih dominan dipraktikkan di Bone.

Mattulada mencatat bahwa pembesar kerajaan yang membantu *Arungmangkau* di Bone dalam menjalankan kekuasaannya terdiri dari, yaitu; *Pertama, To-Makkadengnge Tana* semacam mangkubumi atau perdana Menteri yang memimpin penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan dan membagi kekuasaan untuk diseleenggarakan oleh pembesar lainnya. *To-Makkadengnge Tana* juga dianggap sebagai wakil raja.²⁹ *Kedua, To-Marilalaeng* adalah pemimpin dewan eksekutif kerajaan yang dikenal sebagai *Ade' Pitu Tana Bone* (Dewan Adat Tujuh Negeri Bone) yang terdiri dari tujuh orang raja kecil yang dipimpin oleh satu orang *To Marilaleng*.³⁰

Ketiga, Ade' Pitu adalah pemimpin dari ketujuh negeri (*wanua*) di Bone. Gabungan konfederasi ini lalu melahirkan Tana Bone. Pada perkembangan selanjutnya, ketujuh dewan adat ini duduk dalam dewan kerajaan dengan membagi tugas pemerintahan; a) *Arung Macege* yang bertugas untuk mengurus pemerintahan/administrasi umum kerajaan; b) *Arung Penceng* memimpin urusan keamanan dan pertahanan kerajaan; c) *Arung Tibojong* yang mengepalai kehakiman; d) *Arung Taneteri* Attang bertugas untuk urusan pembangunan dan pekerjaan umum; e) *Arung Taneteri Awang* menjabat sebagai urusan ekonomi; f) *Arung Ta* mengepalai urusan pendidikan dan pengajaran, dan; g) *Arung Ujung* menjabat urusan agama dan penerangan.³¹ *Keempat, To Marilaleng Lolo* bertugas mengawasi daerah-daerah bawahan yang diperintah oleh raja kecil (*Arung Palili*). Wilayah Bone dibagi menjadi beberapa wilayah kecil (*wanua*) yang dipimpin oleh seorang raja kecil yang disebut sebagai *Arung Palili*. Daerah yang lebih kecil disebut *Kampong* yang dipimpin oleh *jennang, macoa* atau *to'do*.³² *Kelima, Ponggawa* adalah panglima angkatan perang kerajaan yang menyusun kekuatan pertahanan dan perang. *Ponggawa* memiliki tiga bawahan yang disebut sebagai *dulung* yang terdiri dari; a) *Dulung Awang Tangka*; b) *Dulung Ajang Ale*, dan; c) *Dulung Lamuru*.³³

²⁹ Mattulada, *Bugis-Makassar: Manusia dan Kebudayaan* (Jakarta: Universitas Indonesia, 1974), h. 27-28.

³⁰ *Ibid.*

³¹ *Ibid.*

³² *Ibid.*

³³ *Ibid.*

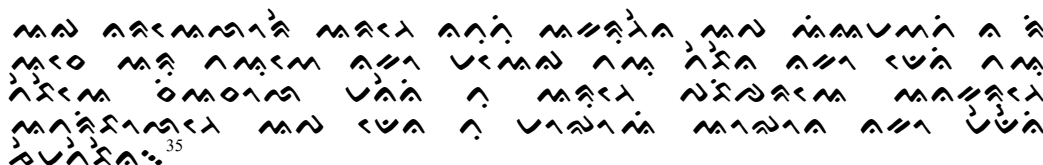
Para aparat negara yang telah disebutkan bekerja secara kolektif membentuk sebuah kekuasaan berdaulat *Staatshoheit* atas rakyatnya. Para aparat bekerja secara kolektif untuk dapat membesarkan kerajaan dan *Arungmangkau*. Mereka bertanggungjawab kepada rakyat dan *Arung* dalam menjalankan tugasnya. Kolektivitas mereka diistilahkan sebagai *masseddi siri* (kesatuan komunal dan kebersamaan) dalam memberikan kebaikan dan kesejahteraan kepada rakyatnya. *Arungmangkau* beserta para aparatnya, *Pakkatenni Ade*, diharuskan untuk berkomitmen untuk memberikan kebaikan terbaik bagi para rakyatnya, sebab kebesaran negara diukur oleh kebaikan dan kesejahteraan yang diperoleh oleh rakyat dan negerinya.

Rakyat dan Negara

Posisi Rakyat dalam negara adalah salah satu elemen konstitutifnya. Rakyat berfungsi sebagai objek kekuasaan serta otoritas dari pejabat dan aparat pemerintahan. Dengan kata lain, rakyat yang juga menjadi populasi negara bukan hanya sekumpulan atau agregasi individu yang mendiami teritori negara, melainkan rakyat merupakan elemen yang diperintah, diatur dan dibentuk sebagai objek kebijakan negara dalam kompleksitasnya, serta bervariasi sesuai dengan bentuk negara, periode sejarah dan rezim politik.³⁴ Rakyat atau *tau têbbê* menjadi elemen vital yang dikaji dalam Latoa. *Tau têbbê* mendapat posisi yang sebelumnya tidak didapatkan dalam narasi La Galigo. Dalam narasi La Galigo, posisi rakyat tak pernah disinggung dan hanya menjadi objek kuasa. Berbeda dalam Lontara Latoa, rakyat telah mendapatkan pengakuan sebagai elemen penting dalam kuasa politik. Posisi vital *tau têbbê* tergambar dari cara Latoa menempatkannya dalam kekuasaan *Arungmangkau*. Pertama kalinya dalam nalar Bugis *tau têbbê* diposisikan sebagai sumber eksistensi raja. Logika politik Bugis beralih dari eksistensi raja untuk dirinya sendiri ala La Galigo, menjadi “ada karena rakyatnya”. Artinya tak ada rakyat, maka tak ada *Arungmangkau*. Demikian sebaliknya, *tau têbbê* tanpa *Arungmangkau* akan menghasilkan entropi dan kehancuran massal dalam masyarakat itu sendiri. Dengan demikian, *Arungmangkau* dan *tau têbbê* dapat diungkapkan dalam logika terkenal dalam masyarakat Bugis, yaitu “*dua tēmmassarang*”, dua entitas yang tak akan pernah terpisah. Di mana *Arungmangkau*

³⁴ Bob Jessop, *Op.Cit.*, h. 34.

hidup dari *siri'* rakyatnya dan juga *tau tēbbē* demi hidup dan keselamatannya harus menjaga *siri'* *Arungmangkaunya*. Dalam Latoa dijelaskan:



Aga narielorēng Arungnge, natutui akkArungēnna, apa iamuatū na riasēng Arung taue, nakko maega tau tēbbēna, nakko deni tau tēbbē'e, siasolang manēnni tu Arungnge, pabbicarae, anakArungnge, atangribolange, apa ade'na tu mmonroi onronna, nakko medde'ni jemmattebbe'na.

Apa yang diharapkan kepada raja ialah agar menjaga degan hati-hati takhta kekuasaannya (dengan menjaga rakyatnya), sebab seorang dikatakan *Arung* jika memiliki rakyat yang banyak. Jika suatu negeri kehilangan rakyatnya, maka para penguasa akan saling merusak, *Arung, pabbicara*, putra mahkota, karena kekuasaan tidak sesuai dengan posisinya (*missmanagement*), dan tidak akan ada yang mampu menempati posisi rakyat apabila mereka semua meninggalkan negerinya.³⁶

Tak ada jalan mereka dapat hidup terpisah satu sama lain. Sebab ketika raja yang tak peduli lagi dengan rakyatnya, maka konsekuensinya adalah *Arungmangkau* akan *ripalesso*, diturunkan dari jabatannya jika tekanan sangat berat; *Kedua*, *Arungmangkau* akan *dijallo* atau diamuk di depan khalayak ramai yang merusak *sirinya*, dan; *Ketiga*, rakyat akan meninggalkan negerinya, sehingga akan merusak citra dan *siri* kerajaannya. Di lain pihak, rakyat yang tak menaati perintah dan memenuhi kewajiban *Arungmangkau* akan ditimpa musibah yang berkepanjangan seperti masa *Pitu Pariameng* yang menimpa masyarakat Bugis di masa lalu.

Arungmangkau serta para *pakkatenni adē'* yang tidak memperdulikan rakyatnya pada titik kesabaran yang habis akan ditinggalkan rakyatnya. Latoa memberikan legitimasi dan membenarkan tindakan itu, yang diistilahkan sebagai *massappa onrong laing* (mencari negeri lain). Bagi seorang *Arung* yang kehilangan kepercayaan dan ditinggal pergi oleh rakyatnya adalah sebuah kegagalan dan kehilangan *siri* yang sangat memilukan. *Arung* dianggap tidak becus dan tidak cakap dalam menjalankan pemerintahan yang akan menjadi olokan dan hinaan bagi sesamanya *Arung*. Dalam Latoa dijelaskan:

³⁵ B.F. Matthes, *Op.Cit.*, h. 46-47.

³⁶ Mattulada, 1995, *Op.Cit.*, h.169.

᳆᳚᳚ ᳆᳚᳚ ᳆᳚᳚᳚᳚᳚ ᳆᳚ ᳆᳚᳚᳚ ᳆ ᳆᳚᳚᳚᳚᳚ ᳆᳚᳚᳚
 ᳆᳚᳚᳚ ᳆᳚᳚᳚᳚᳚ ᳆᳚᳚᳚᳚᳚ ᳆᳚᳚᳚᳚᳚ ᳆᳚ ᳆᳚᳚᳚᳚᳚
 ᳆᳚᳚᳚᳚᳚ ᳆᳚᳚᳚᳚᳚ ᳆᳚᳚᳚᳚᳚ ᳆᳚᳚᳚᳚᳚ ᳆᳚᳚᳚ ᳆᳚᳚᳚᳚᳚
 ᳆᳚᳚᳚᳚᳚ ᳆᳚᳚᳚ ᳆᳚᳚᳚ ᳆᳚᳚᳚᳚᳚ ᳆᳚᳚᳚᳚᳚ ᳆᳚᳚᳚᳚᳚ ᳆᳚᳚᳚᳚᳚
 ᳆᳚᳚᳚᳚᳚ ᳆᳚᳚᳚᳚᳚ ᳆᳚ ᳆᳚᳚᳚᳚᳚ ᳆᳚᳚ ᳆᳚᳚᳚᳚᳚ ᳆᳚᳚᳚᳚᳚ ᳆
 ᳆᳚᳚᳚᳚᳚.³⁷

Nakko cappu'ni pappenedinna tau tēbbē'e ri pappenidinna Arungnge ênrêngnge pabbicarae iatonasa napogau tau tēbbē'e mplaiengnge wanuae, nalokka sappa' wanua laingngne, nakko lobbanni wanuae, inappa tonisa napēneddingi pēddie Arungnge, ênrêngnge pabbicarae, anak Arungnge, ata ribolaie, de'na paggangkanna pēddie napeneddingi.

Apabila habis kesabaran rakyat itu pada perasaannya pada *Arung* dan *pabbicara*, maka adapun yang diperbuat oleh rakyat ialah meninggalkan negeri pergi mencari negeri yang lain. Apabila kosong negeri barulah dirasakan kesengsaraan oleh *Arung*, *pabbicara* serta para *anak Arung* (putra mahkota) dan *ata-ribolaie* (keluarga kerajaan). Tak adalah taranya penderitaan itu dirasakan.³⁸

Arung serta *Pabbicara* yang mampu menjaga amanah yang diembankan oleh rakyatnya, maka akan mendapatkan kemuliaan, kesejahteraan dan kemakmuran. *Arung* berserta para *pakkatenni adē'*nya akan menjadi buah bibir yang manis bagi negara tetangganya. *Sirinya* akan menghidupkan kharismanya, yang membuatnya disegani oleh raja negara tetangga. Latoa juga mengakui dan melegitimasi hak pengabdian rakyat yang total kepada raja yang telah mendapatkan amanah kekuasaan. Latoa mengajarkan kepada rakyat yang menghadap *Arung* dengan penuh tata krama dan kesopanan. Badiknya diperbaiki dengan seksama, sebab ketika badiknya jatuh di hadapan *Arung*, berarti orang tersebut tak mampu menjaga diri dan *siri'*nya. Hukumannya adalah *rappa' gajang*, ditikam di tempat. Matanya juga tidak boleh melirik ke wanita dan perempuan yang ada dalam istana.³⁹ Rakyat juga tidak boleh berbicara seenaknya kepada *ata ribolang* (penghuni istana) terutama kepada para perempuan dengan seenaknya, bahkan seorang rakyat lelaki yang dipanggil oleh *ata ribolang* perempuan, lalu hanya berdua saja, lelaki tersebut dibolehkan untuk lari.⁴⁰ Demikian sebagian tata krama dan etika kesopanan rakyat kepada *Arung* untuk menjaga marwah dan *siri* rajanya, agar raja dengan sepenuh hati memberikan pelayanan yang tulus kepada seluruh rakyatnya.

Posisi rakyat dari deskripsi Latoa di atas menunjukkan dua hal, selain sebagai objek kekuasaan, rakyat juga memiliki fungsi partisipatif kekuasaan yang berbeda dari

³⁷ B.F. Matthes, *Op.Cit.*, h. 46.

³⁸ Mattulada, 1995, *Loc.Cit.*

³⁹ *Ibid.*, h.153.

⁴⁰ *Ibid.*, h.253-259.

narasi kekuasaan ala La Galigo. Dalam beberapa kasus yang tidak disinggung dalam Latoa, rakyat beserta pembesarnya memiliki inisiatif untuk mengangkat pemimpin asing, jika orang tersebut memiliki kecakapan dan kemampuan yang layak. Kasus *Tomanurung* dianggap sebagai orang asing dari tempat yang antah-berantah.⁴¹ Demikian juga, kepemimpinan Datu Segeri yang memimpin beberapa masa di kerajaan Tanete. Paradigma baru yang ditawarkan dalam Latoa yang berbeda dari narasi politik La Galigo adalah rakyat dapat berpartisipasi secara aktif dalam kekuasaan dan kebijakan pemerintahan.

Wilayah Kekuasaan Negara

Kajian Ian Caldwell menunjukkan zonasi daerah kerajaan di Sulawesi Selatan bersifat fleksibel. Sebuah wilayah boleh saja dipindahkan ke kerajaan lain untuk menambah kekuasaan dan posisinya dalam kerajaan lainnya. Selain itu, pembagian wilayah kerajaan dapat terjadi dengan proses pernikahan yang diistilahkan sebagai *marital politics* antara raja kecil (*palili*) dengan raja yang lebih kuat (*Arung*). Proses pernikahan ini membuat kekuasaan raja besar (*Arung*) semakin kuat, di sisi lain *palili* mendapatkan perlindungan dari proses pernikahan tersebut.⁴² Demikian juga wilayah dapat dileburkan ke kerajaan yang lebih ketika rakyat dan *matoa* sepakat untuk bergabung dengan kerajaan tertentu, baik melalui perang atau secara sukarela. Andi Zainal Abidin Farid menyebutkan bahwa daerah Sekkanasu yang kalah perang dari kerajaan Wajo, maka rakyat Sekkanasu bersama dengan para *matoa* mendatangi Arummatoa Wajo dan menyatakan diri untuk bergabung dengan kerajaan Wajo, sedangkan daerah secara sukarela menggabungkan diri dengan Wajo adalah daerah Timurung.⁴³

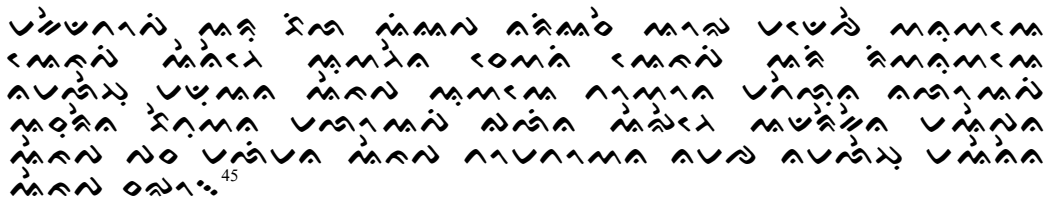
Sayangnya, Latoa tidak membarikan penjabaran secara detail tentang zonasi wilayah kerajaan. Latoa tidak berbicara secara spesifik bentuk wilayah kerajaan, jenis daerah dan sebagainya, akan tetapi Latoa mengakui tapal batas kerajaan dari negara

⁴¹ David Henley & Ian Caldwell, "Kings and Covenants: Stranger-kings and Social Contract in Sulawesi" dalam *Indonesia and the Malay World*, Vol. 36, No. 105 (2008), h. 269-291.

⁴² Ian Caldwell, "Power, State and Society among the Pre-Islamic Bugis" dalam *Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde*, Vol. 151 No. 3 (1995), h. 402.

⁴³ Andi Zainal Abidin Farid, "Wajo' Pada Abad XV-XVI: Suatu Penggalan Sejarah Terpendam di Sulawesi Selatan dari Lontara". *Disertasi*. (Jakarta: Universitas Indonesia, 1979), h. 650.

kerajaan tetangga. Tidak ada ajaran spesifik Latoa tentang wilayah kerajaan dan mekanisme pembagian tapal batasnya. Ajaran Latoa hanya menyinggung tentang kewajiban pejabat pemerintah untuk tinggal di *Laleng Bata* (daerah dalam atau administrasi kerajaan).⁴⁴ Selain itu, Latoa juga menyinggung tentang wilayah yang layak dijadikan sebagai perkampungan. *Arung Bila* menjelaskan dalam Latoa



Makkêdatopi Arung Bila, iapa na riasêng onro madeceng wanuae êngkapi ênnêngne uangênna, seuani êngkapi Arung ri wanuae, namalêmpu, maduanna êngkapa wae tuona, matêllunna maloappi assurênna, bettuanna maloappi galunna ênrêngnge addarêkênna, maêppa'na êngkapa pasa', malimanna êngkapa tomatoana na macca na malêmpu, maennenna êngkapa sanro.

Berkata pula *Arung Bila* suatu negara barulah dapat disebut berkedudukan baik (negara yang baik) apabila ia memiliki enam syarat; pertama, apabila ada raja yang jujur dalam negeri; kedua, apabila ada air hidup (mata air)nya; ketiga, luas tempat keluarnya, artinya luas sawah dan ladangnya; keempat, apabila ada pasarnya; kelima, apabila ada orang tuanya yang (bijak dan) jujur, keenam apabila ada dukunnya.⁴⁶

Selain kedua tema di atas, Latoa tidak menjelaskan lagi tentang zonasi wilayah kekuasaan secara jelas. Menurut Mattulada, kemungkinan besar pembahasan tentang zona tapal wilayah bukanlah domain dalam Latoa, melainkan dikaji dan dibahas dalam *wari' tana*. *Wari* dalam sistem *panggaderreng* merupakan aturan protokoler yang mengatur masalah administrasi kemasyarakatan, salah satunya adalah *wari' tana*.⁴⁷

Penutup

Kajian ini menunjukkan bahwa masyarakat Bugis memiliki sistem yang mengatur mekanisme tata kelola pemerintahan yang tertuang dalam Lontara Latoa. Kajian ini mengeksplorasi elemen vital negara, yakni aparatur pemerintahan, rakyat dan populasi, serta wilayah kekuasaan. Dari kajian tersebut disimpulkan bahwa aparatur pemerintahan dalam Lontara Latoa dipimpin oleh seorang raja yang dibantu oleh

⁴⁴ B.F. Matthes, *Op.Cit.*, h. 63.

⁴⁵ *Ibid.*, h. 6.

⁴⁶ Mattulada, 1995, *Op.Cit.*, h. 133.

⁴⁷ *Ibid.*, h. 236.

pampawa ade dan *parewa sara'*. Ketiga institusi ini merepresentasikan dari elemen negara yang disebutkan Weber sebagai *Staatsgewalt* (kekuasaan negara) yang dipegang oleh *Arung*, *Staatsapparat* (kekuasaan aparatur) yang direpresentasikan oleh *pampawa ade* dan *parewa sara'* serta *Staatshoheit* atau kedaulatan negara yang secara kolektif dijaga oleh *Arung* beserta aparatnya yang membentuk kebersamaan kolektif atau *masseddi siri'*.

Rakyat dalam Latoa tidak hanya sebatas penduduk permanen dan tetap yang menjadi objek kekuasaan dan otoritas negara yang diistilahkan oleh Weber sebagai *Staatsvolk*. Melainkan Latoa memberikan sebuah paradigma partisipatif yang tidak diberikan dalam paradigma politik La Galigo. Sehingga rakyat dalam Latoa telah mendapatkan hak politik serta berperan subjek kekuasaan dalam bentuk partisipasi politik.

Sayangnya, Latoa tidak memberikan penjelasan spesifik tentang wilayah dan zonasi pemerintahan. Hal tersebut disebabkan karena paradigma zonasi dalam nalar politik Bugis bersifat fleksibel dan tidak tetap. Sebuah wilayah dapat dijadikan sebagai syarat perjanjian ataukah sebagai mahar dalam perkawinan politik. Namun hal tersebut tidak mengurangi urgensi Latoa sebagai referensi politik yang perlu dikaji lebih jauh. Penelitian ini tidak menyinggung tentang keprotokoleran pemerintahan, syarat dan kriteria pejabat pemerintahan serta berbagai dimensi politik lain yang dijelaskan dalam Latoa. Sehingga penulis berharap penggalian politik lokal mampu mengalihkan pandangan ke Lontara Latoa.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Andi Zainal. "The Emergence of Early Kingdom in South Sulawesi" dalam *Southeast Asian*, Vol. 20, No. 4 (1983), h. 455-491.
- Ali, A. Muh. *Bone: Selayang Pandang*. Watampone: Departemen Pendidikan & Kebudayaan, 1966.
- Bakker, Anton & Achmad Charris Zubair. *Metodologi Penelitian Filsafat*. Yogyakarta: Pustaka Filsafat, 1990.
- Budiardjo, Miriam. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.

- Caldwell, Ian. "Power, State and Society among the Pre-Islamic Bugis" dalam *Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde*, Vol. 151 No. 3 (1995), h. 394-421.
- Cumming, William. "Rethinking the Imbrication of Orality and Literacy: Historical Discourse in Early Modern Makassar" dalam *The Journal of Asian Studies*, Vol. 62, No. 2 (2003), h. 531-551.
- Farid, Andi Zainal Abidin. "Wajo' Pada Abad XV-XVI: Suatu Penggalan Sejarah Terpendam di Sulawesi Selatan dari Lontara". *Disertasi*. Jakarta: Universitas Indonesia, 1979.
- Geertz, Clifford. *Negara: The Theatre of State in Nineteenth-Century Bali*. New Jersey: Princeton University Press, 1980.
- Henley, David & Ian Caldwell, "Kings and Covenants: Stranger-kings and Social Contract in Sulawesi" dalam *Indonesia and the Malay World*, Vol. 36, No. 105 (2008), h. 269-291.
- Jessop, Bob. *The State: Past, Present, Future*. Cambridge: Polity Press, 2016.
- Kaelan. *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat*. Yogyakarta: Paradigma, 2005.
- Kolhoof, Sirtjo. "The La Galigo: a Bugis Encyclopedia and its Growth" dalam *BKI* 155, No. 3 (1999), h. 362-387.
- Koro, Nasaruddin. *Ayam Jantan Tanah Daeng: Siri & Pesse dari konflik Lokal ke Pertarungan Lintas Batas*. Jakarta: Ajuara, 2006.
- Matthes, B.F. *Boeginesche Chrestomathie*. Amsterdam: Gedrukt bij C.A. Spin, 1872.
- Mattulada. *Bugis-Makassar: Manusia dan Kebudayaanannya*. Jakarta: Universitas Indonesia, 1974.
- . *Latoa: Satu Lukisan Analitis terhadap Antropologi Politik Orang Bugis*. Ujung Pandang: Hasanuddin University Press, 1995.
- Muhajir, Noeng. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Yogyakarta, 1996.
- Omar, Rahilah. "The History of Bone A.D. 1775-1795: The Diary of Sultan Ahmad as-Salleh Syamsuddin". *Thesis*. UK: University of Hull, 2013.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
- Rahman, Nurhayati. *Retna Kencana Colliq Pujie Arung Pancana Toa 1812-1876: Intelektual Penggerak Zaman*. Makassar: La Galigo Press, 2008.

Awal Muqsith, Muhammad Saleh Tajuddin, Andi Aderus

Rasdiyanah, Andi. *Sistem Panggaderreng dalam Latoa dengan Sistem Syariat Islam (Wacana Integrasi Sistemik)*. Makassar: Alauddin University Press, 2013.

Suryabrata, Sumadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010.